

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kotamadya dengan 626 kecamatan, 641 kelurahan dan 5.321 desa.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di pulau jawa paling tinggi setelah DKI pada peringkat nomor 1 dan Jawa Barat jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 47.379.389 Jiwa tahun 2016. Provinsi Jawa Barat juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, yakni 14.33% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, dimana 60% PDB Sektor Industri Manufaktur berasal dari Jawa Barat (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2017).

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, mencapai 5,76% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02%. Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4% dan PMDN mencapai 14,1%, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat (2017).

### **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi di setiap daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan daerah yang serasi dan merata baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dalam rangka mendorong setiap daerah untuk tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi serta karakteristik fisik yang dimilikinya. Sebagai tolak ukur

keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah dan sektor.

Menurut Pujoolwanto (2014:87) Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah, sehingga sumber penerimaan daerah meningkat terutama berasal dari pajak daerah semakin tinggi. Minat investor untuk berinvestasi di daerah akan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga meningkat, yang juga dapat berimbas pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Nugraha dan Dwirandra (2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber atau beberapa indikator antara lain pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan.

Menurut PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Artinya Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan PAD dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah untuk mengalokasikan pertumbuhan ekonomi. Setiap terjadi perubahan kebijakan dan kondisi perekonomian akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pula pada PAD di setiap daerah, dimana PAD merupakan sumber utama biaya pembangunan

di daerah. Artinya daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rori et al (2016), peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Terdapat fenomena yang terjadi di Jawa Barat, pada periode 2011 hingga 2016 yang tersaji dalam tabel 1.1 berikut ini

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PAD Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2011-2016**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PAD (LN)
2011	6,48%	29.47
2012	6,21%	29.73
2013	6,33%	29.92
2014	5,09%	30.19
2015	5,03%	30.39
2016	5,67%	30.41

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2017

Pada tabel 1.1 menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat mengalami kondisi yang berfluktuasi dari tahun 2011 sampai 2016. Tahun 2012, LPE melambat dibandingkan dengan tahun 2011, dimana hal tersebut disebabkan karena kinerja sektor pertanian yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2013, LPE mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, dimana hal tersebut disebabkan oleh faktor dari sisi ekspor serta konsumsi pemerintah. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan kontribusi dari tiga sektor utama Jawa Barat yaitu sektor industri, perdagangan dan pertanian mampu mendorong peningkatan kinerja ekonomi. Pada tahun 2014, LPE Jawa Barat kembali mengalami perlambatan, yang didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga meskipun investasi dan konsumsi pemerintah meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2015 LPE kembali mengalami perlambatan tetapi tahun

2016 terjadi peningkatan walaupun kondisinya belum diatas tahun 2011, dimana hal tersebut disebabkan oleh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau perlambatan yakni pertambangan, listrik, dan gas. Adapun dari sisi PAD Jawa Barat periode tahun 2011 hingga 2016 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan PAD Jawa Barat tersebut sebagian besar diperoleh dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) dan beberapa kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memudahkan pelayanan dalam melakukan pembayaran pajak, seperti program gratis denda PKB dan biaya BBNKB, serta program samsat keliling dengan menggunakan mobil dan samsat gendong dengan motor didesain untuk menjemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat.

Berdasarkan fenomena pertumbuhan ekonomi dan PAD Jawa Barat bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi oleh penurunan PAD. Dalam penelitian sebelumnya, Rori *et al* (2016) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti jika PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Namun, berbeda dengan, Budi Santosa (2013) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, mungkin terjadinya kebijakan dalam penarikan PAD sehingga memberatkan masyarakat.

PAD adalah sumber pendanaan utama yang dimiliki Pemerintah Daerah, karena sektor pendapatan daerah dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, karena semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah, selain dari PAD pemerintah daerah juga mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari desentralisasi fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ketiga indikator tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembentukan desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melakukan pembangunan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga merangsang perkembangan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayahnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan bahwa desentralisasi fiskal ini bertujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah mengelola daerahnya dan mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah, Irvan & Karmini (2016).

Berikut ini disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan Provinsi Jawa Barat pada tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Dana perimbangan**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Dana Perimbangan (LN)
2011	6,48 %	28.37
2012	6,21 %	28.43
2013	6,33 %	28.57
2014	5,09 %	28.66
2015	5,03 %	28.55
2016	5,67%	29.99

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2017

Pada tabel 1.2 Dana perimbangan Provinsi Jawa Barat tahun 2011 – 2016 berasal dari Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2011-2012 dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 0,13% setiap sumber dana mengalami kenaikan terutama untuk DAU dan LPE mengalami penurunan sebesar 0,27% , sedangkan tahun 2013-2014 dana perimbangan mengalami kenaikan tiap tahun pada 0,23% dan tahun 2015-2016 mengalami perlambatan pada dana perimbangan tetapi diakhir tahun dana perimbangan terjadi peningkatan sebesar 8,06%, selanjutnya

LPE tiap tahun mengalami penurunan dan peningkatan tetapi tidak sebanding dengan tahun 2011, dimana hal ini pada tahun 2013-2014 LPE mengalami penurunan 0,24% dan 2015-2016 mengalami kenaikan 0,64% . Bila dibandingkan dengan LPE menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan dana perimbangan tidak berbanding positif dengan LPE. Dalam penelitian sebelumnya, Panji dan Indrajaya (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun berbeda dengan, Widiyanto et al (2016), menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dana alokasi khusus berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya penelitian ini dikarenakan PAD dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama daerah, sehingga besarnya pemanfaatan PAD dan dana perimbangan tersebut perlu dianalisis kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan daerah dalam penggunaan dan pemanfaatan anggarannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditemukan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji ulang dan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi** (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016)”

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dilihat dari Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) periode tahun 2011-2016 mengalami perlambatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Jawa Barat periode tahun 2011-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penurunan Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu diiringi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan PAD dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial :
  - a. PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016?
  - b. Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan PAD dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
  - a. PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016?
  - b. Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2016?

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan tambahan pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi, dan untuk menguatkan teori-teori yang ada mengenai PAD, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi serta menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan program kerja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan dana perimbangan dan PAD yang dimiliki setiap daerah.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable dependen. Sedangkan variable independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh antar variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial.

### **1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Objek Penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan data laporan realisasi PDRB, PAD dan Dana Perimbangan yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang mengolah data kegiatan tersebut.

### **1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2017 hingga selesai. Periode objek penelitian adalah 6thn 2011 sampai dengan 2016.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai penjelasan rangkuman teori PAD, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Menampilkan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian pada kesimpulan penelitian serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan secara kronologis dan sistematis.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mengemukakan uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah.